



**KOMUNIKASI RISIKO PUSAT
PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
(PUSDALOPS-PB) DALAM KESIAPAN MENGHADAPI
ANCAMAN BENCANA**

Ario Akbar Lomban¹⁾, Jamalullail²⁾

¹⁾ Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat PB BNPB

²⁾ Dosen Program DIK - Universitas Sahid Jakarta

Abstrak

Letak geografis Indonesia yang berada pada jalur pergerakan tiga lempeng dunia Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik adalah hal yang menyebabkan Indonesia dikenal sebagai negara dengan supermarket bencananya, atau negara dengan wilayah rawan bencana. Saat ini Indonesia telah mengidentifikasi tingkat risiko bahaya di seluruh wilayah dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), yang menginformasikan tingkat bahaya tinggi, sedang dan rendah pada satu daerah. IRBI merupakan platform dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat menjadi informasi awal untuk mengetahui dan memahami risiko bencana oleh stakeholder penanggulangan bencana dan masyarakat. Berdasarkan indeks tersebut pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat dapat menentukan langkah prioritas dan tindakan keselamatan untuk meminimalisir dampak bencana. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana (PB) sebagai unit yang dibentuk untuk melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi secara rutin, dan memobilisasi sumberdaya hingga memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan, sejatinya sangat terbantu dalam menyampaikan informasi risiko bahaya dengan memanfaatkan data dan informasi IRBI ataupun platform informasi kebencanaan lainnya. InaRisk merupakan transformasi dari IRBI yang berbasis open source untuk memberikan gambaran spasial secara visual wilayah Indonesia yang terancam bencana dengan luasan populasi terdampak, potensi kerugian dan kerusakan lingkungan. Pemahaman risiko bencana dan meneruskannya melalui informasi bahaya secara dini kepada stakeholder PB dan masyarakat, merupakan rangkaian operasional Pusdalops PB dalam upaya kesiapsiagaan melalui diseminasi informasi dan komunikasi untuk kesiapan menghadapi keadaan chaos atau situasi darurat. Pusdalops PB dalam fungsinya sebagai fasilitator komunikasi, perlu mengamati, memahami risiko dan mengkomunikasikan risiko yang dapat berangkat dari IRBI, InaRisk maupun media pemantauan lainnya untuk mendorong kesiapsiagaan suatu wilayah menghadapi ancaman bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji operasional Pusdalops PB dalam merespon potensi bahaya yang teridentifikasi dengan komunikasi dan koordinasi saat

*Correspondence Address : akbarlomban@gmail.com, Jamalullail@usahid.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v9i1.2022.495-504

© 2022UM-Tapsel Press

situasi siaga darurat. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk melihat fakta sebenarnya operasional Pusdalops PB dalam proses hingga produksi informasinya terkait pemanfaatan data dan informasi sekunder sebagai landasan melakukan komunikasi risiko untuk upaya penanganan bencana.

Kata Kunci: Risiko Bencana, Pusdalops PB, Siapsiaga & Komunikasi

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana harus dimaknai bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sungguh dianugerahi wilayah rawan dan potensi bahaya dari letak geografi yang berpotensi terjadinya berbagai macam bencana alam. Gempabumi, tsunami hingga letusan gunungapi yang pernah melanda negeri ini, merupakan pesan bahwa lepasan energi bumi dari pertemuan lempeng tektonik dunia dan keberadaan 139 gunungapi dengan 127 gunungapi aktif yang membentang dari ujung Sumatera, Jawa, Bali, Maluku hingga Sulawesi dengan rangkaian letak posisi gunungapi di Indonesia yang hampir membentuk sebuah lingkaran dikenal juga dengan istilah cincin api (*ring of fire*), menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat yang tinggal dan meraih kehidupannya di kaki lereng gunungapi. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Indonesia merupakan negara peringkat ke-3 sebagai negara yang memiliki gunungapi terbanyak setelah Amerika Serikat (173 gunungapi) dan Rusia (166 gunungapi) dengan berbagai sejarah letusannya adalah Gunungapi

Merapi (2006), Gunungapi Sinabung (2013), Gunungapi Agung (2017), Gunungapi Kelud (2014) dan lainnya. Peningkatan tersebut patut dimaknai bahwa 127 gunungapi aktif ini merupakan ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu dari fenomena geologi.

Wilayah Indonesia yang juga berada pada garis khatulistiwa, menyebabkan negara ini sering diterpa dampak *El Nino* dan *La Nina* dengan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah maupun kering. *El Nino* dan *La Nina* berasal dari bahasa Spanyol. *El Nino* berarti "anak kecil" dan *La Nina* berarti "gadis kecil". *El Nino* adalah pemanasan suhu di atas permukaan laut yang terjadi di Samudera Pasifik. *El Nino* membuat suatu daerah memiliki suhu panas yang jauh lebih tinggi dari daerah lain, yang dapat memicu terjadinya bahaya kekeringan dan kemarau panjang yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau bencana hidrometeorologi kering di sebagian wilayah Indonesia. Berbeda dengan *El Nino*, *La Nina* membuat suhu permukaan laut di Samudera Pasifik mengalami pendinginan di bagian tengahnya, dan dampak *La Nina* di Indonesia adalah meningkatnya curah hujan di sebagian

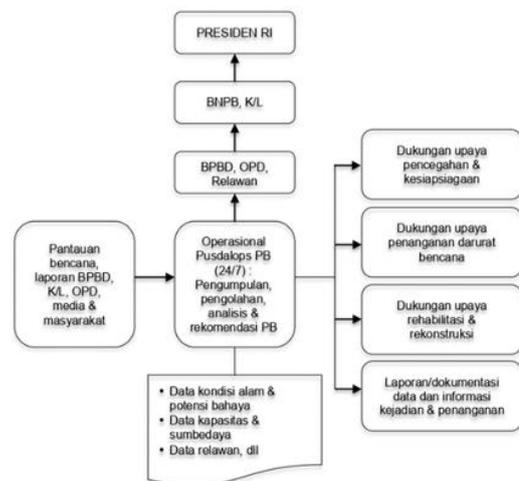
1. Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusian informasi kebencanaan;
2. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
3. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator, pengerahan sumberdaya, untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
4. Fungsi koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Dengan fungsi tersebut, peran Pusdalops PB terdapat pada seluruh fase penanggulangan bencana. Pada fase prabencana untuk “memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi kebencanaan secara rutin. Perannya pada fase tanggap darurat atau keadaan darurat yaitu “memberikan dukungan pada Pos Komando Tanggap Darurat dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan. Pada fase tanggap darurat terdapat fase siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan. Sedangkan pada fase pascabencana peran Pusdalops PB adalah “memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi, melalui penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penelitian ini berfokus pada proses dan produksi informasi Pusdalops PB dari data dan informasi yang telah ada dan dikumpulkan, diolah dan dianalisis selama 24/7 untuk menghasilkan rekomendasi kepada pengambil kebijakan dan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya penanganan bencana dalam situasi

ketika potensi bahaya yang akan mengarah pada ancaman bencana atau dalam situasi siaga bencana. Melihat peran Pusdalops PB baik di BNPB maupun BPBD, ditenggarai belum maksimal dalam memanfaatkan data dan informasi baik itu yang berasal dari IRBI, InaRisk ataupun informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi Geologi dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), United States Geological Survey (USGS) maupun lembaga lainnya dalam melakukan pengolahan dan analisis dari pemantauan yang dilakukan. Pusdalops PB cenderung meneruskan informasi kepada pihak terkait secara khusus saat situasi siaga darurat. Operasional Pusdalops PB cenderung melakukan respon ketika menerima laporan dari wilayah terdampak bencana. Dalam situasi siaga darurat, Pusdalops PB seharusnya dapat meneruskan informasi peringatan dini bencana berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data atau ketika hasil pemantauan telah terdeteksi ancaman pada daerah-daerah yang berisiko tinggi dan dikomunikasikan melalui berbagai moda komunikasi, terlebih saat terjadinya dampak perubahan iklim El Nino dan La Nina akibat pemanasan global yang telah menjadi siklus tahunan.

Gambar 2. Pengolahan Data, Informasi & Komunikasi Pusdalops PB



Membahas komunikasi dalam operasional Pusdalops PB tidak dapat terlepas dari data informasi dari hasil pengumpulan, pengolahan, analisis untuk mengkomunikasikan risiko bencana. Kebutuhan data menggambarkan sebuah representasi fakta yang menjadi dasar tersusunnya rangkaian kegiatan fase penanggulangan bencana secara terstruktur. Dengan kata lain bahwa "Generally, data represent a structured codification of single primary entities, as well as of transactions involving two or more primary entities ." (Vercellis, 2009:6). Selain deskripsi dari sebuah fakta, data dapat pula merepresentasikan suatu objek sebagaimana dikemukakan oleh Wawan dan Munir (2006: 1) bahwa "Data adalah nilai yang merepresentasikan deskripsi dari suatu objek atau kejadian (event)". Begitupun dengan informasi yang merupakan suatu hasil dari pemrosesan data menjadi sesuatu bermakna bagi yang menerimanya, sebagaimana dikemukakan oleh Vercellis (2009: 7) "Information is the outcome of extraction and processing activities carried out on data, and it appears meaningful for those who receive it in a specific domain ." Selain merupakan hasil dari pengolahan data, informasi juga menggambarkan sebuah kejadian, sebagaimana dikemukakan oleh Wawan dan Munir (2006:1) bahwa "Informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) dengan lebih berguna dan lebih berarti". Data dan informasi dapat menjadi dasar dalam perencanaan penanggulangan bencana. "Askes data dan informasi adalah satu hal yang sangat penting dalam keberhasilan pengurangan risiko bencana. Termasuk saat situasi darurat yang memerlukan manajemen krisis. "You will not be able to manage disasters properly, if you cannot measure the impact of the disaster itself". "Data dan statistik sangat

penting untuk memahami dampak kerugian & kerusakan akibat bencana maupun untuk kebutuhan pemulihan" Margareta Wahlstrom (UN-ISDR 2013).

Pemahaman berbagai teori data dan informasi dan melihat dari berbagai fungsi Pusdalops PB sebagaimana amanat Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 bahwa proses dan produksi informasi merupakan komunikasi risiko yang seharusnya dilakukan oleh Pusdalops PB, untuk memberikan efek tindakan keselamatan masyarakat yang harus diambil. Komunikasi risiko yang diharapkan selaras dengan pemikiran Harold Laswell bahwa komunikasi adalah satu arah yang berguna untuk menjawab suatu pertanyaan, "Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect". Pusdalops PB sebagai satu unit organisasi dalam konsep penanggulangan bencana secara nasional, dibentuk untuk mampu mengelola data dan informasi hingga dapat menyebarluaskan kepada pejabat yang berwenang dan masyarakat melalui berbagai media komunikasi yang ada, dengan prinsip cepat dan tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntable. Pusdalops PB dapat juga dikatakan sebagai fasilitator komunikasi untuk membangun suatu upaya kesiapan masyarakat menghadapi ancaman bencana dari pemantauan kondisi alam dan aktivitas potensi bahaya pada wilayah risiko bencana tinggi. Penelitian ini ingin melihat tiga permasalahan utama, yaitu: Pertama, apakah pemanfaatan data dan informasi sekunder kebencanaan sebagai referensi dalam komunikasi Pusdalops PB? Kedua, apakah komunikasi risiko dalam fungsi operasional Pusdalops PB 24/7 telah terbangun diantara peran stakeholder penanggulangan bencana dan kesiapan masyarakat? Ketiga, apakah koordinasi pada fase siaga darurat bencana dikomunikasikan berdasarkan hasil pengelolaan data dan informasi kebencanaan?.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara dan prosedur dari keberadaan subjek dan objek berdasarkan fakta yang terlihat dan hubungan kausalitas yang ditimbulkan. (Moleong, 2019). Metode deskriptif kualitatif (Sugiyono (2016:9) adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman fungsi dari makna operasional Pusdalops PB yang dalam fungsi Pusdalops PB harus dipahami sebagai bagian dari tujuan Pengurangan Risiko Bencana yang terkandung dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Pusdalops PB berada pada ranah mengkomunikasikan kesiapsiagaan dan siapsiaga sebagai cerminan keberadaan organisasi penanggulangan bencana untuk meminimalisir potensi bahaya dan ancaman bencana dari sesuatu yang rentan, yang dapat terjadi kapan saja, sehingga respon sigap dan segera dari kondisi darurat adalah strategi yang harus selalu siap dioperasionalkan.

HASIL DAN DISKUSI

1. Komunikasi Pusdalops PB Dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Kebencanaan
Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive menjadi preventif, sedianya juga dapat terapkan melalui pemanfaatan data dan informasi kebencanaan dalam operasional Pusdalops PB saat melakukan pemantauan 24/7. Hasil pemantauan tidak hanya melalui pengamatan tanda-

tanda ataupun gejala alam yang telah teridentifikasi akan mengarah pada ancaman bencana. Potensi bahaya juga dapat diketahui berdasarkan data peristiwa bencana tahunan yang pernah terjadi seperti dampak pemanasan global maupun perubahan iklim El Nino dan La Nina sebagai suatu siklus. Data dan informasi fenomena alam yang telah tersaji seperti prakiraan tinggi gelombang, perkiraan cuaca, prakiraan angin, potensi kebakaran hutan dan lahan dari kemungkinan bencana hidrometeorologi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ataupun pantauan tinggi muka air (TMA) saat musim hujan dari Balai Pengelola Sumber Daya Air (BPSDA) baik yang berada ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk informasi potensi bahaya banjir, perlu ditindaklanjuti dengan analisis Pusdalops PB melalui berbagai platform system informasi kebencanaan untuk menghasilkan rekomendasi untuk meminimalisir masyarakat yang terancam bencana. Sistem informasi risiko bencana atau InaRisk yang berbasis Geografic Information System (GIS) telah memetakan tingkat risiko bahaya tinggi, sedang dan rendah suatu wilayah yang juga dapat disertai (overlay) dengan Data Informasi Bencana Indonesia (DiBI) yang menyajikan data jumlah penduduk, sekolah, rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang terpapar bencana sebagai referensi untuk menghitung perkiraan dampak bencana. Analisis risiko bencana juga dapat dilakukan berdasarkan data maupun informasi lembaga terkait lainnya yang dipadukan dengan informasi InaRisk, DiBI dan lainnya yang memang dibangun sebagai sumber-sumber data dan informasi bagi BNPB dan BPBD. Pengelolaan dan pengolahan data yang terjalin dari komunikasi sebelumnya adalah untuk menghasilkan sebuah informasi dari Pusdalops PB dalam upaya

menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman bencana.

Dalam pengamatan penulis, komunikasi organisasi baik internal maupun eksternal oleh Pusdalops PB, belum intens dilakukan untuk memperoleh sumber-sumber data dan informasi guna proses pengolahan yang dapat menghasilkan informasi terkini. Pusdalops PB BNPB maupun BPBD sebagai pengumpul data cenderung melakukan pencatatan setelah menerima informasi terjadinya peristiwa bencana dan Pusdalops PB sebagai penerima informasi teramati cenderung hanya meneruskan informasi dari lembaga pemantauan lain tanpa melalui proses pengolahan dan analisis untuk rekomendasi nyata sebagai produk informasi dalam upaya penanggulangan bencana yang harus dilakukan.

2. Komunikasi Risiko Dalam Fungsi Pusdalops PB

Ilmu komunikasi terus berkembang sangat nyata. Pemikiran positivism klasik dikatakan bahwa data memegang peranan penting sebagai sumber pengetahuan dan perubahan menjadi positivism modern. Ilmu pengetahuan sebagai sebuah system, patut diselaraskan juga dengan konsep data (data), information (informasi), knowledge (pengetahuan) dan wisdom (kebijakan) sebagaimana pandangan oleh Russell Lincoln Ackoff, bahwa data sebagai lapis paling dasar untuk tahapan berikutnya yaitu informasi. Dari informasi selanjutnya akan menjadikannya sebagai ilmu pengetahuan untuk menghasilkan kebijakan atau keputusan terhadap persoalan dan nilai tertentu. Hirarki DIKW oleh Lincoln Ackoff merupakan bagian dari proses komunikasi data dan informasi dalam empat fungsi operasional Pusdalops PB.

Hasil pengelolaan data dan informasi dari berbagai platform system informasi kebencanaan baik yang

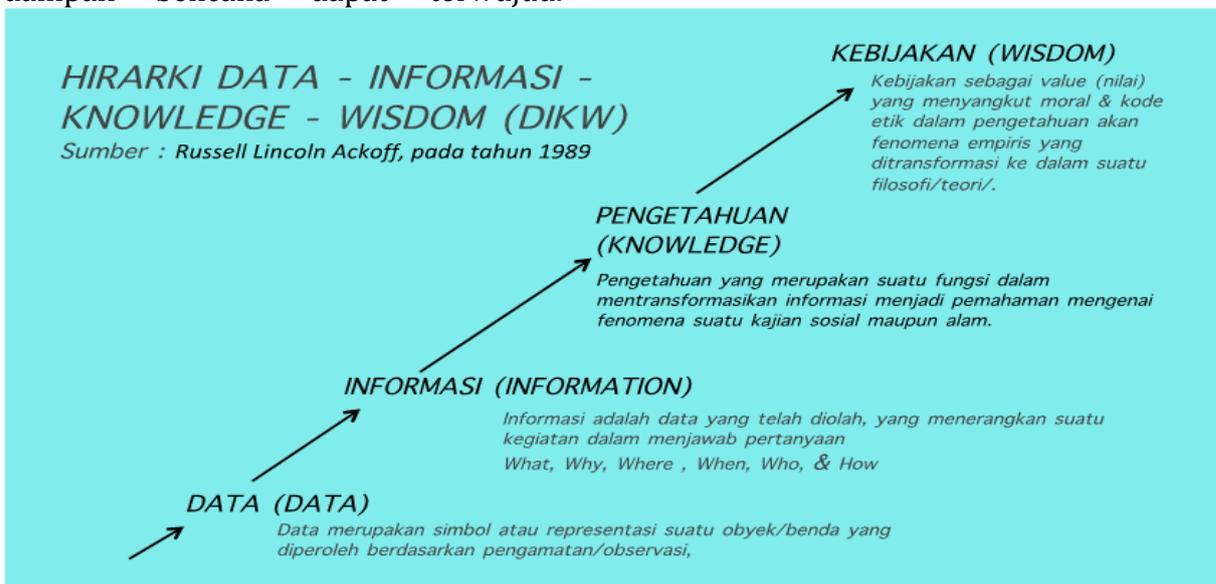
bersumber BNPB/BPBD maupun lembaga lainnya sejatinya dapat dilihat sebagai informasi risiko dari potensi bahaya dan ancaman bencana yang perlu dikomunikasikan oleh Pusdalops PB sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat terdampak bencana. Komunikasi dan koordinasi Pusdalops PB dengan institusi, lembaga, relawan, semata untuk upaya memobilisasi potensi penanganan bencana dan meminimalisir korban jiwa dari hasil indikasi risiko bahaya yang akan mengarah pada peristiwa bencana dalam waktu yang dekat. Informasi yang dihasilkan oleh Pusdalops PB harus dapat mudah diakses, cepat diketahui dan mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait dalam upaya kesiapsiagaan, evakuasi sebagai wujud komunikasi risiko dan langkah penyelamatan masyarakat terpapar.

3. Pusdalops PB Sebagai Fasilitator Komunikasi Bencana

Fungsi utama Pusdalops PB selama 24/7 adalah menerima, mengolah, menganalisa, mendistribusikan informasi dan peringatan dini hingga memberikan rekomendasi kepada instansi terkait hingga masyarakat. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh Pusdalops PB merupakan fungsi-fungsi komunikasi dalam berbagai level komunikasi organisasi baik internal maupun eksternal. Menurut Goldhaber (1986) komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Komunikasi internal personil Pusdalops PB adalah jenis komunikasi yang berfokus pada kedalaman interaksi antar sesama anggota dalam struktur organisasi. Komunikasi eksternal Pusdalops PB adalah komunikasi yang dibangun

dengan pihak diluar organisasi sebagai bentuk koordinasi yang dapat memperkuat proses dan produksi informasi Pusdalops PB. Dari pandangan Goldhaber, dapat dikatakan bahwa proses penyampaian, penerimaan serta pertukaran data maupun informasi merupakan pesan yang dikumpulkan dan diolah sebagaimana tujuan dibentuknya Pusdalops PB untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Proses penyampaian, penerimaan maupun bertukar informasi dan pesan dapat dilakukan secara formal maupun informal selama tujuan mengurangi dampak bencana dapat terwujud.

Organisasi Pusdalops PB sebagai komunikator pada tahap-tahap tertentu dapat mempengaruhi stakeholder penanggulangan bencana dan masyarakat sebagai komunikan. Begitu juga sebaliknya ketika stakeholder dan masyarakat sebagai komunikator dapat memberikan pengaruh pada Pusdalops PB sebagai komunikan. Pandangan ini sejalan dengan teori fusi yang diperkenalkan oleh Bakke pada tahun 1957, yang berawal dari kesadaran Bakke pada tahun 1950 mengenai kesadaran mengenai kepuasan minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi maupun organisasi.



Pusdalops PB dalam seluruh fungsinya menjalankan perannya sebagai fasilitator komunikasi kebencanaan baik pada fase prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Pusdalops PB dalam melakukan komunikasi darurat bencana dimulai sejak potensi bahaya telah teramati, yang akan mengarah pada peristiwa bencana atau dalam situasi siaga darurat bencana. Menghadapi siaga darurat bencana, komunikasi risiko dalam proses pengolahan dan analisis data perlu dikomunikasikan secara internal maupun eksternal, mulai dari potensi wilayah terpapar, dampak yang akan terjadi, kekuatan sumberdaya logistik,

peralatan, relawan hingga menggelar rencana kontijensi maupun aktivasi rencana operasi dengan prioritas penanganan darurat bencana. Keberadaan unit Pusdalops PB dengan semua perangkat teknologi dan informasi harus dimaknai sebagai bentuk pemerintah dalam membangun upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pusdalops PB harus menjadi sentra informasi yang dapat dipercaya, lengkap dan cepat dalam upaya mengkomunikasikan risiko bencana dan komunikasi krisis bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusdalops PB belum sepenuhnya berorientasi pada paradigma pengurangan risiko bencana dalam konteks komunikasi risiko bencana. Pemanfaatan data dan informasi sekunder dalam bagian proses pengolahan, analisis, informasi peringatan dini, belum menghasilkan produk informasi yang dapat digunakan untuk merespon potensi bahaya, baik karena siklus bencana tahunan maupun hasil analisis lainnya dengan konten yang mudah dipahami untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.

KESIMPULAN

- Pembentukan Pusdalops PB baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota merupakan bagian rencana pemerintah untuk penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana. Keberadaan Pusdalops PB adalah wujud pengurangan risiko bencana (PRB) sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Komunikasi Pusdalops PB dalam operasionalnya cenderung berfokus pada upaya tanggap darurat

dengan pemahaman yang sangat kental pada ruang responsif setelah peristiwa bencana terjadi. Hal itu dapat terjadi karena kurangnya pemahaman yang utuh bahwa fungsi-fungsi kerja Pusdalops PB berangkat dari pemanfaatan data dan informasi kebencanaan untuk komunikasi risiko bencana.

- Dalam konteks ilmu komunikasi, Pusdalops PB merupakan media dan channel komunikasi (two way communication) terlebih disaat situasi siaga bencana dengan informasi peringatan dininya bagi masyarakat dan stakeholder PB untuk memobilisasi sumberdaya dalam upaya penanganan darurat bencana.
- Konsep operasional Pusdalops PB selama 24/7 sebagaimana Perka BNPB Nomor. 15 Tahun 2012 sangat kental dengan pengelolaan data dan informasi untuk mekanisme kerja pada kondisi normal, peringatan dini, tanggap darurat dan pengembalian ke situasi normal. Sehingga perlu dipahami bahwa komunikasi organisasi internal dan eksternal Pusdalops PB merupakan komunikasi risiko yang diharapkan mampu memberikan efek kesiapsiagaan dan siapsiaga masyarakat menghadapi ancaman bencana melalui proses, pesan, jaringan, keadaan saling tergantung, hubungan, lingkungan dan ketidakpastian (Goldhaber, 1993)

REFERENSI

Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Diakses pada tanggal 20 Desember 2021 melalui www.bnpb.go.id

Peraturan Kepala BNPB Nomor. 15 tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalop PB). Diakses pada tanggal 20 Desember 2021 melalui www.bnpb.go.id.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2020. Diakses pada tanggal 20 Desember 2021 melalui www.bnpb.go.id

Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Pengertian Komunikasi Organisasi: Fungsi, Teori, Jenis dan Manfaat. Diakses pada 20 Desember 2021 melalui <https://www.gramedia.com/literasi/komunikasi-organisasi/Pengertian>

Komunikasi Pemerintah Melalui Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepada Publik. Jurnal Ilmu Komunikasi Rika Oktariani & Eka Wenats Wuryanta, November 2020.

Media Massa, Khalayak Media, The Audience Theory, Efek Isi Media dan Fenomena Diskursif. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Hasyim Ali Imran, 2012.

Komunikasi Krisis Pemerintahan^[1]_[SEP] (Studi Kasus Pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Pasca Kasus Suap Annas Maamun Tahun 2014), Jurnal Komunikasi oleh Dwi Gayatri Mistar dan Mutia Dewi, 2012.

Buku Komunikasi Bencana: Aspek Penting Pengurangan Risiko Bencana oleh Dr. Puji Lestari, SIP, M.Si, 2018. Sleman : PT Kanisius.